

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2025 dibanding triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha Konstruksi yang berkontraksi sebesar 0,83 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,54 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kinerja angkutan darat, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan lebaran. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 7,90 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,58 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,57 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,42 persen serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,11 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,83 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,15 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,64 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai lebih dari 70 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) berkontraksi sebesar 3,75 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Konstruksi sebesar 15,38 persen. Selain itu, lapangan usaha lainnya yang berkontraksi adalah Jasa Pendidikan sebesar 11,86 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,46 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,54 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 2,68 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berkontraksi 2,33 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang positif, diantaranya Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,27 persen, Jasa Perusahaan sebesar 1,94 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,80 persen.

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatra menunjukkan perbaikan. Pada periode triwulan I-2025, Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi, yaitu sebesar 5,47 persen; diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,22 persen; Kepulauan Riau sebesar 5,16 persen; Provinsi Bengkulu sebesar 4,84 persen; Provinsi Sumatera Utara 4,67 persen; Provinsi Sumatera Barat 4,66 persen; Provinsi Riau sebesar 4,65 persen; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,60 persen; Provinsi Aceh sebesar 4,59 Persen; dan Provinsi Jambi berada pada peringkat terakhir dengan pertumbuhan sebesar 4,55 persen. Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh provinsi-provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,57 persen, Provinsi Riau sebesar 23,33 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,58 persen. Sementara itu, Provinsi Jambi berada pada peringkat ketujuh dengan kontribusi terhadap PDRB Sumatera sebesar 6,53 persen.

Inflasi yang terjadi pada Triwulan I 2025 didorong oleh kelompok Perumahan Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas tarif listrik dengan andil sebesar 0,95% (mtm), adapun peningkatan harga pada tarif listrik diindikasikan oleh normalisasi pasca telah berakhirnya insentif dan pemerintah dalam bentuk diskon tarif listrik

sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga PLN dengan daya 2.200 VA kebawah untuk periode Januari dan Februari 2025. Untuk komoditas bawang merah terpantau mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh peningkatan permintaan masyarakat pada periode Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri 1446 H, komoditas pertanian lain seperti Bayam dan Kangkung juga tercatat mengalami peningkatan harga masing-masing sebesar 0,06% dan 0,05% (mtm) secara berurutan. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh terbatasnya pasokan lokal akibat intensitas hujan yang tinggi serta didorong juga oleh peningkatan permintaan masyarakat Provinsi Jambi.

Di sisi lain, inflasi bulanan Provinsi Jambi yang lebih tinggi tertahan oleh adanya penurunan harga pada komoditas Cabai Merah, Angkutan Udara, Cabai Rawit, Cabai Hijau, dan Kacang Panjang dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga komoditas Cabai Merah, Cabai Rawit, dan Cabai Hijau diindikasikan oleh melimpahnya pasokan seiring dengan masuknya musim panen cabai lokal dan juga beberapa daerah di sekitar Provinsi Jambi. Sementara itu, Angkutan Udara tercatat mengalami penurunan harga yang disebabkan oleh kebijakan diskon tarif angkutan udara yang diberikan pemerintah selama momen HBKN Idul Fitri 2025. Lebih lanjut, komoditas Kacang Panjang tercatat menurun yang disebabkan oleh melimpahnya hasil panen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Realisasi inflasi Provinsi Jambi tercatat didorong oleh seluruh Kab/Kota IHK yaitu Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Kerinci. Secara bulanan, Kota Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,84% (mtm). Selain itu, Kabupaten Bungo juga tercatat mengalami inflasi sebesar 2,16% (mtm) lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,42% (mtm). Lebih lanjut, Kabupaten Kerinci tercatat mengalami inflasi sebesar 0,67% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,09% (mtm). Berdasarkan realisasi tersebut, secara *year-on-year* Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci masing-masing berada pada urutan ke 125, 38, dan 143 dari 150 Kabupaten/Kota berdasarkan urutan tertinggi inflasi tahunan secara nasional.

Mencermati perkembangan inflasi terkini dan beberapa indikator harga, pada bulan Maret 2025 IHK Provinsi Jambi diperkirakan akan mengalami peningkatan. Perkembangan IHK periode bulan April 2025 diperkirakan akan mengalami inflasi. Beberapa faktor risiko inflasi di antaranya masih berlanjutnya normalisasi harga komoditas tarif Listrik terutama untuk pelanggan pasca-bayar. Lebih lanjut banyaknya hari libur serta efek lanjutan pasca berakhirnya HBKN Idul Fitri 2025 diperkirakan akan meningkatkan inflasi Provinsi Jambi terutama untuk disagregasi VF. Kondisi cuaca serta intensitas hujan yang tinggi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi juga diperkirakan akan meningkatkan risiko gagal panen atau penurunan kualitas beberapa komoditas pertanian di Provinsi Jambi. Dari sisi disagregasi AP, normalisasi harga komoditas tarif angkutan udara diperkirakan akan turut meningkatkan harga apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Prospek inflasi IHK di tahun 2025 diperkirakan terkendali dan berada dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ namun, untuk menuju pencapaian target sasaran tersebut terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian. Risiko Pertama yaitu faktor cuaca dan bencana banjir di Provinsi Jambi dan daerah pemasok yang diprediksi mengalami musim hujan dengan intensitas tinggi

dan sangat tinggi pada Triwulan I dan awal Triwulan II-2025, mendorong inflasi komoditas dalam kelompok *volatile foods*. Selain itu, inflasi IHK diprediksi turut didorong oleh kontinuitas kenaikan harga emas dunia sebagai dampak dari meningkatnya tensi geopolitik global dan dampak tidak langsung dari potensi perang dagang antar Amerika dan China yang semakin terlihat. Lebih lanjut, tren peningkatan harga energi dunia juga perlu diwaspadai dapat meningkatkan harga pada komoditas dis Agregasi *Administered Price* dan efek akumulatifnya dalam peningkatan biaya produksi komoditas secara umum. Dalam melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah melalui TPID dan Tim Satgas Pangan serta melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terkait perkembangan inflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai forum koordinasi dan aksi nyata pengendalian inflasi di daerah dilakukan guna menekankan pentingnya upaya dalam melakukan evaluasi pengendalian inflasi serta sinergi program pengendalian di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pada bulan Maret 2025 di antaranya:

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Rapat rutin mingguan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri RI.
2. Gerakan Pangan Murah (GPM) Di seluruh Kabupaten/Kota
Gerakan Pangan Murah (GPM) resmi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi pada 4 Maret 2025, dengan pembukaan oleh walikota dan Wakil Walikota Jambi. Kegiatan ini kemudian dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk Sarolangun (12 Maret) , Sungai Penuh (13 Maret) dan tanjabtim (4-21 Maret). GPM menyediakan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, cabai, dan telur dengan harga terjangkau untuk masyarakat, terutama dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.
3. Operasi Pasar dan Sidak Pengawasan Harga
Untuk memastikan ketersediaan dan harga pangan yang stabil, telah dilakukan:
 - Sidak Pasar di Kota IHK maupun non-IHK oleh Kepala Daerah se-provinsi Jambi.
 - Operasi pasar Minyakita dan Gas LPG 3 Kg di Pasar sanggaran Agung Kerinci (12 Maret) dan Pasar Senen Siulak (17 Maret).
 - Pengawasan distribusi minyak goreng dibawah HET (Rp. 14.700/liter) di 11 kecamatan di Muaro Jambi (19 Maret).

4. Pasar Murah Ramadhan oleh TPID dan Bulog
Bulog Jambi bersama TPID Kota/Kab menyelenggarakan Pasar Murah Ramadhan di berbagai lokasi, termasuk Kota Jambi, Batanghari, Sungai penuh (5-14 Maret); dan Kerinci Muaro Jambi, tanjabtim, Tebo, serta Bungo. (10-24 Maret).

5. HLM TPID Provinsi Jambi

Pada 14 Maret 2025, Gubernur Jambi memimpin rapat HLM TPID Provinsi Jambi yang dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Jambi. Poin-poin pembahasan dan kesepakatan antara lain:

- Penandatanganan komitmen bersama Kepala Daerah untuk menjaga inflasi di kisaran

2,5% ±1%

- Peningkatan pengawasan produsen dan distributor khususnya komoditas minyak goreng, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta rencana pembentukan BUMD Pangan,

6. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Kampanye “Bijak Belanja” melalui tayangan di Jambi TV (7x sehari) dan *time signal* azan Maghrib selama periode ramadhan 1446 H serta sosialisai implementasi QRIS untuk transaksi non-tunai di pasar tradisional.

7. Penanaman Padi untuk Ketahanan Pangan

Bupati tebo melakukan penanaman perdana padi seluas 2 hektar (18 Maret) sebagai upaya meningkatkan pasokan beras lokal dan mengendalikan inflasi. Kegiatan ini melibatkan TPID, TNI, dan kelompok tani.

8. Kerja Sama dengan BUMN dan Pelaku Usaha

- Kerja Sama TPID di Kab/Kota dan Pertamina dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg bersubsidi.
- Bulog, PTPN IV, dan Kejaksaan Negeri Tanjabtim mengadakan pasar murah di Pasar Blok D (19 Maret) dengan harga khusus.
- Toko Daging Indonesia (TDI) turut serta menyediakan daging kerbau, telur, dan minyak goreng dengan harga terjangkau.

9. GPM Serentak Nasional

GPM Serentak Nasional dilaksanakan di Provinsi Jambi (19 Maret) oleh TPID Provinsi Jambi dengan dukungan TVRI Jambi dan KPw BI Provinsi Jambi.

10. GPM Dalam Rangka HUT Prov. Jambi ke 68 (Tanggal 11 Januari 2025)

11. GPM Mandiri Sebapo (16 Januari 2025)

12. GPM Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan di DW Persatuan (25 S.D 27 Februari 2025)

13. GPM Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan di Pijoan dan Sebapo (28 Februari 2025)

14. Operasi Pasar HBKN di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (05 Maret 2025)

15. Operasi Pasar HBKN di GOR Kota Baru (06 Maret 2025)

16. Operasi Pasar HBKN di Halaman Kantor Camat Mestong Kabupaten Muara Jambi (13 MARET 2025)

17. GPM Serempak di Halaman TVRI Jambi (19 Maret 2025)

18. GPM OP Beras SPHP di Kota Baru (20 Maret 2025)

19. OP Beras SPHP di Desa Kasang Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten. Muara Jambi (25 Maret 2025)

20. OP Beras SPHP di Jln Samarinda Kota Baru (26 Maret 2025)

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **MEMBANGUN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH BAIK PADA JANGKA PENDEK, JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG;**
2. **MENGALOKASIKAN ANGGARAN PADA KEGIATAN MELALUI APBD PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DALAM MENDUKUNG PENGENDALIAN INFLASI;**
3. **OPTIMALISASI POTENSI PRODUKSI KOMODITAS PANGAN UTAMA SEBAGAI PENYUMBANG INFLASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM LAHAN HORTIKULTURA ABADI (LAHTIBA) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA;**
4. **MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN PETANI DAN BULOG DALAM MENJAGA DAN MENGATUR KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN KHUSUSNYA BERAS;**
5. **MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN PARA DISTRIBUTOR PEMASOK KEBUTUHAN POKOK DI DAERAH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT;**
6. **MEMANFAATKAN ALIH TEKNOLOGI DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN MELAKUKAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN MASYARAKAT;**
7. **MEMBANGUN DAN MENJAGA SISTEM LOGISTIK TRANSPORTASI DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN STOK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT;**
8. **MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (KAD) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT SECARA KEBERLANJUTAN;**
9. **MENGATUR TATA NIAGA PANGAN DENGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PELAKSANA MELALUI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PANGAN DAN KEBERADAAN TOKO TPID DI SETIAP DAERAH; DAN**
10. **MELAKUKAN PENGAWASAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI YANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI AGENDA EVALUASI BERSAMA MELALUI RAPAT KOORDINASI TIPD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.**

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Perlunya meningkatkan Peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di Provinsi Jambi sangat strategis dalam mendukung pengendalian inflasi provinsi maupun nasional;
- Pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan cukup signifikan karena berpotensi merugikan produsen seperti petani dan peternak, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan.
- Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk membantu petani mencari langkah

antisipasi sehingga produksi komoditas pertanian/pangan tetap dapat dilakukan.

Dalam jangka pendek :

- Menyusun data neraca pangan Provinsi Jambi sebagai dasar pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Jambi.
- Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Perindag dan Bulog Provinsi Jambi dalam melaksanakan Operasi pasar dan Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilitasi harga bahan pokok pada bulan Januari s.d Desember 2025.
- Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kota/kabupaten di Provinsi Jambi atau antar provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis.
- Meningkatkan sinergi Pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi (Rakor) TPID berkala, serta meningkatkan sinergi dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta menggiatkan gerakan pemberian modal bagi pengusaha/UMKM yang bergerak dibidang budidaya cabai, timun, bawang merah, sawi, kangkung, kol dan lain-lain juga pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar (bekerjasama dengan Bank Indonesia).
- Pemerintah Kota/Kabupaten perlu meningkatkan proses digitalisasi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
- Mengevaluasi Program Unggulan (output) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didukung oleh TPID Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sehingga secara efektif menjaga capaian inflasi pada level rendah dan stabil, tepat sasaran dalam menyelesaikan problem inflasi daerah serta berada pada track yang sesuai dalam upaya Pengendalian Inflasi daerah.
- TPID Provinsi Jambi dan instansi terkait terus mengadakan rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan pada hari senin yang bertujuan untuk mengevaluasi komoditas yang menyumbang kenaikan inflasi dan mencari solusi terbaik.

Dalam jangka menengah/panjang :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengendalian Inflasi

- Monitoring dan evaluasi dan Pengawasan implementasi KAD agar tidak hanya berhenti dengan penandatanganan MoU dan PKS.
 - Mendorong Fasilitasi Kerjasama secara Business to Business (B2B), tidak hanya Government to Government (G2G)
 - Mendorong peran BUMD Pangan dalam Pelaksanaan KAD, baik untuk pemenuhan kebutuhan di daerah maupun pendistribusian ke daerah lain.
1. Kebijakan *extra effort* masih dilanjutkan sampai akhir tahun 2025 guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran;
 2. Tersedianya data merupakan hal yang strategis guna mendukung kebijakan pengendalian harga pangan strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional sehingga perlu sinergi data dan informasi pangan antar lembaga dan/atau daerah yang mencakup harga, pasokan, dan jadwal panen;
 3. Pemanfaatan data produksi pertanian sebagai identifikasi potensi KAD karena mayoritas produksi komoditas pangan masih terfokus di wilayah Indonesia bagian Barat terutama Pulau Jawa, sehingga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan;
 4. Melaksanakan aktifitas sesuai dengan peta pangan strategis yang mengindikasikan

posisi surplus dan devisa Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi.

5. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah;
6. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal;
7. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan
8. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga komoditas hortikultura dengan penyediaan mesin pengawet atau *cold storage*.